

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-PLANNING* PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Sains Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau**



**OLEH :**

**NAMA : RENI DESRITA  
NOMOR MAHASISWA : 177122050  
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
BKU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-PLANNING* PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Reni Desrita**

**NPM : 177122050**

TIM PENGUJI

Ketua

**Dr. H. Syafhendry, M.Si.**

Sekretaris

**Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.**

Anggota I

**Dr. Muhd. Arif Ham Rianan, S.Kom., M.I.Kom.**

Anggota II

**Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si**

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum**

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-PLANNING* PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

---

**TESIS**

**NAMA : Reni Desrita**  
**NPM : 177122050**  
**Program Studi : Ilmu Administrasi Publik**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing**

Pembimbing I  
Pekanbaru,

**Dr. H. Syafhendry, M.Si.**

Pembimbing II  
Pekanbaru,

**Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Islam Riau

**Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Desrita  
NPM : 177122050  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)  
Judul : Implementasi Sistem *E-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian tesis yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

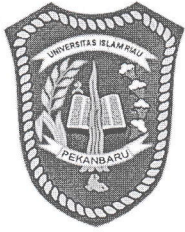
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021

Pembuat Pernyataan



Reni Desrita



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 288/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RENI DESRITA**  
NPM : **177122050**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 13 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi

  
Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 13 Desember 2021  
Staf Pemeriksa

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 13-Dec-2021 08:32 WIB  
ID: 1728552465  
Word Count: 17706  
Submitted: 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:	26%
Publications:	4%
Student Papers:	13%

IMPLEMENTASI SISTEM E-PLANNING PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

By **Reni Desrita**

4% match (Internet from 12-Oct-2021)

[https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2018/08/file/Cover -](https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2018/08/file/Cover_-_Naskah_Akademik_E-Gov_(1).pdf)

[\\_Naskah Akademik E-Gov \(1\).pdf](#)

3% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://eprints.stainkudus.ac.id/637/5/5.%20BAB%20II.pdf>

3% match (Internet from 10-Dec-2020)

<http://repository.uinsu.ac.id/10064/1/SKRIPSI%20RAHMADANI-EKI.pdf>

3% match (student papers from 04-Mar-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-04

3% match (Internet from 11-Apr-2021)

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13405-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13405-Full_Text.pdf)

1% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://eprints.stainkudus.ac.id/1268/5/File%206%20%20BAB%202.pdf>

1% match (Internet from 19-Oct-2021)

[http://eprints.polbeng.ac.id/1904/4/LKP\\_LISA%20DUWI%20NIATI%20PUTRI\\_FULL%20TEXT.pdf](http://eprints.polbeng.ac.id/1904/4/LKP_LISA%20DUWI%20NIATI%20PUTRI_FULL%20TEXT.pdf)

1% match (Internet from 19-Nov-2019)

<https://www.scribd.com/document/380524431/BAB-II-1-pdf>

1% match (Internet from 15-Apr-2019)

<http://repository.radenintan.ac.id/6201/2/SKRIPSI%20INDO%20DICKY.pdf>

1% match ()

Nuravita, Winda. "Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)", 2018

1% match (Internet from 04-Feb-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/228850939.pdf>

1% match (Internet from 25-Aug-2019)

<http://pascasarjanabasith.blogspot.com/2014/12/tesis-tentang-pengabdian-santri.html>

1% match (Internet from 13-Jul-2021)

<http://repository.uinjambi.ac.id/5837/1/SKRIPSI%20DILLA%20%282%29-1.pdf>

1% match (Internet from 05-Apr-2021)

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/senaster/article/download/2658/1549>

1% match (Internet from 05-Jun-2020)

<https://pt.scribd.com/document/348827085/Uas-Akk-Jaufan>

1% match (student papers from 03-Feb-2021)

Submitted to University of Muhammadiyah Malang on 2021-02-03

1% match (student papers from 03-Jul-2021)

Submitted to Washoe County School District on 2021-07-03

1% match (student papers from 06-Jan-2016)

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2016-01-06

1% match (Internet from 11-Oct-2021)

[https://jdih.pesisirselatankab.go.id/files/peraturan\\_10-10-2019-07-50-29.pdf](https://jdih.pesisirselatankab.go.id/files/peraturan_10-10-2019-07-50-29.pdf)

1% match (Internet from 02-Jul-2019)

<https://journal.stikomys.ac.id/index.php/media-aplikom/article/download/39/17/>

1% match (Internet from 03-Sep-2020)

<https://manajemen86.blogspot.com/2011/09/desain-organisasi.html>

IMPLEMENTASI SISTEM E-PLANNING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Tesis Pada Program

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

NOMOR : 344/KPTS/PPs-UIR/2021

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa dikarenakan adanya kendala secara teknis dalam proses bimbingan Penulisan Tesis, Maka perlu dilakukan pergantian pembimbing penulisan tesis.
  2. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS-UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
  9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Reni Desrita** tanggal 5 Juni 2021
  10. Mencabut Surat Keputusan Nomor : 239/KPTS/PPs-UIR/2021 Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing Baru	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Syafhendry, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RENI DESRITA**  
N P M : **177122050**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi**  
Judul Tesis : **"IMPELEMENTASI SISTEM E-PLANNING PADA BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 12 Juni 2021

Direktur.

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum**

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

# IMPLEMENTASI SISTEM *E-PLANNING* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui dan menganalisis penghambat Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup bagus dan sudah terimplementasi dengan baik di mana dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala umum seperti SDM yang kurang kompeten di bidang komputerisasi karena tidak adanya pelatihan khusus dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi hingga Kementerian. Padahal pelatihan akan sangat membantu terciptanya SDM handal dalam pengelolaan sistem *e-Planning* pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Faktor-faktor penghambat pada implementasi sistem *e-Planning* yang paling dominan adalah proses mutasi jabatan yang cukup sering terjadi sehingga butuh proses adaptasi yang lama bagi tim baru untuk mengelola sistem *e-Planning* di OPD. Dan juga faktor jaringan internet masih menjadi penghambat terlaksananya Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Kata Kunci : Implementasi, Sistem, E-Planning**

# IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE MERANTI ISLANDS REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY

## ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the implementation of the e-Planning system in Meranti Islands Regional Development Planning Agency and to find out and analyze the inhibition of the implementation of the e-Planning system in Meranti Islands Regional Development Planning Agency. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out with observation, interviews and documentation. Data analysis used is a descriptive method of analytics. The results showed that the implementation of the e-Planning system implementation at the Meranti Islands Regional Development Planning Agency was quite good but in the process there are still some common obstacles such as human resources that are less competent in the field of computerization due to the absence of special training from Meranti Islands Regional Development Planning Agency, provinces to ministries. Though the training will greatly help the creation of reliable human resources in the management of e-Planning systems at the Meranti Islands Regional Development Planning Agency. The most dominant factors inhibiting the e-Planning system at the Meranti Islands Regional Development Planning Agency are the job mutation process often enough that it takes a long adaptation process for the new team to manage the e-Planning system in the organization of the regional. And also the internet network factor is still an obstacle to the implementation of the e-Planning system at the Meranti Islands Regional Development Planning Agency.*

**Keywords: Implementation, System, E-Planning**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dengan segala keterbatasannya dapat penulis selesaikan.

Tesis ini berjudul **“Implementasi Sistem *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”** ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada :

1. Orang tua, Mertua, Suami, dan Anak-anak karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos. M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
5. Dr. H. Syafhendri, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis

menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik Tahun 2017 khususnya kelas A, dan adik-adik tingkat yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
10. Dan para narasumber yang telah membantu dalam wawancara penelitian saya ini, kiranya Allah yang membalas segala kebaikan narasumber sekalian.

Penulis bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamin

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

Reni Desrita

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Bab I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
Bab II    STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Studi Kepustakaan .....	11
2.1.1. Konsep Administrasi Publik .....	11
2.1.2. Teori Organisasi .....	19
2.1.3. Konsep Implementasi .....	24
2.1.4. <i>E-Government</i> .....	31
2.1.5. Teknologi Informasi .....	39
2.1.6. Konsep Perencanaan .....	36
2.1.7. Sistem <i>E-Planning</i> .....	45
2.1.8. Penelitian Terdahulu .....	48
2.2. Kerangka Berpikir .....	54
2.3. Konsep Operasional .....	55
2.4. Operasional Variabel .....	59
Bab III    METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian .....	62
3.2. Lokasi Penelitian .....	62
3.3. Sumber Data Penelitian.....	63

3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.5. Teknik Analisis Data .....	67
Bab IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Ringkas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	70
4.2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	70
4.3. Fungsi dan Tugas Organisasi .....	72
4.4. Sumber Daya Organisasi .....	73
Bab V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	
5.1. Gambaran Subjek Penelitian .....	81
5.2. Implementasi Sistem <i>E-Planning</i> pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	84
5.2.1. Komunikasi.....	84
5.2.2. Sumber Daya.....	89
5.2.3. Disposisi .....	97
5.2.4. Struktur Birokrasi.....	103
5.3. Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Sistem <i>E-Planning</i> Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	107
Bab VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan .....	112
6.2. Saran .....	113

Daftar Pustaka

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Pengguna Sistem <i>e-Planning</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	5
2.1. Operasional Variabel Penelitian Implementasi Sistem <i>e-Planning</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	60
3.1. Informan Penelitian Implementasi Sistem <i>e-Planning</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	66
4.1. Pembagian ASN dan Honorer BAPPEDA berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan .....	74
4.2. Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Alur Kerja Sistem Informasi Manajemen <i>e-Planning</i> .....	4
4.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	72
4.2. Komposisi ASN dan Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jenis Kelamin.....	75
4.3. Komposisi ASN dan Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
4.4. Komposisi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Golongan.....	77
4.5. Komposisi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat dan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dan peralihan sistem kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melakukan perubahan dalam semua bidang kegiatan, bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan akuntabilitas, serta berbagai manfaat positif lainnya yang dapat diperoleh dengan adanya perubahan tersebut.

Konsep pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik lebih dikenal dengan *Electronic Government* atau *e-Government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dengan lebih efisien dan efektif. Contoh pelaksanaan *e-Government* yang telah banyak dilakukan adalah pembuatan situs web pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan *e-Government* diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah dapat memperoleh akses informasi dan layanan publik dengan lebih mudah dan efisien.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada

data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Hak dan tanggung jawab pemerintah daerah makin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *Good Governance*.

Dalam era revolusi teknologi maka pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk menjadikan sistem perencanaan pembangunan lebih akuntabel melalui pengelolaan media teknologi dan informasi. Untuk itu perlu diadakannya suatu praktik perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem *Planning, Programming, and Budgeting Sistem* (PPBS). Untuk konsep *Good Governance* saat ini pemerintah daerah mencoba untuk memaksimalkan yang namanya *e-Planning*.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Pemerintahan Daerah di Indonesia yang telah menerapkan *e-Government* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerangkan bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi melalui sistem *e-Planning*, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap

proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah”. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai ujung tombak perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti telah menggunakan sistem elektronik dalam mendukung proses penyelenggaraan perencanaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaah Staf Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 050/BAPPEDA-set/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem *e-Planning* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aplikasi *e-Planning* merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan tujuan dapat mengawal pembangunan di setiap daerah agar seluruh perencanaan daerah dapat berjalan dengan lancar, seluruh perencanaan dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah dipantau.

Sistem *e-Planning* memiliki alur dan tahapan kerja yang sudah diatur dengan seksama dalam pengaplikasiannya. Alur tersebut dapat dilihat dengan seksama dalam gambar berikut ini :



**Gambar 1.1. Alur Kerja Sistem Informasi Manajemen *e-Planning***

*E-Planning* atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah alat bantu yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah salah satunya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, transparan, terintegrasi maupun konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti memang tidak terlepas dari peran BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sebuah badan yang memiliki tugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut adalah data mengenai pengguna sistem *e-Planning* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :

**Tabel 1.1. Pengguna sistem *e-Planning* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Pengguna <i>e-Planning</i>	Jumlah
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	11
2	Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti	1
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	1
4	Dinas di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	16
5	Badan di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	6
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	1
7	Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	9
	<b>Total</b>	<b>45</b>

**Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021**

Pengguna sistem *e-Planning* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah seluruh perangkat daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Meranti yang terbagi menjadi 11 Bagian, Sekretariat Dewan (Setwan) Kepulauan Meranti, Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti, 16 Dinas dan enam Badan di Kepulauan Meranti, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti, serta sembilan kecamatan yang tersebar di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pengaplikasian sistem *e-Planning* yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini memang sudah dapat membantu kinerja namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi yang dapat memperlambat proses sistem diantaranya keterlambatan menginput data sehingga *e-Planning* tersebut belum digunakan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 Bab III Pasal 6 yang menegaskan bahwa ruang lingkup sistem *e-Planning* meliputi dokumen perencanaan dan dokumen terkait lainnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Dokumen Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
- d. Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan;
- e. Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Provinsi;
- f. Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- g. Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah;
- h. Pra-Rencana Kerja dan Anggaran (Pra-RKA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- i. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- j. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- k. Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
- l. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- m. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA)-  
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- n. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah.

Berdasarkan hasil dari observasi, peneliti menemukan beberapa fenomena dalam penerapan sistem *e-Planning* oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi atau kebijakan terkait sistem *e-Planning* yang berubah sejalan dengan perubahan birokrasi pada struktur pemerintahan;
2. *User* belum terbiasa menggunakan sistem *e-Planning* secara terprosedur, karena adanya waktu *deadline* untuk penutupan pengajuan usulan kegiatan program, dan terkadang sistem validasi sering mengalami keterlambatan;
3. Hambatan yang terjadinya karena adanya gangguan fasilitas jaringan internet yang berdampak pada pengoperasian program *e-Planning*;
4. Sistem terkadang belum siap dalam proses input data, masalah ini sering terjadi pada saat ingin melakukan input data di sistem *e-Planning*, hingga dengan begitu pemerintah akan terhambat pada saat mereka ingin memasukan data. Contoh kasusnya adalah kegiatan program yang diusulkan ketika sistem sudah mencapai batas waktu pengusulan, maka *e-Planning* sudah tidak bisa menerima. Penyebabnya terjadi karena adanya dari aspek sarana dan

prasarana atau perangkat IT dan pengguna itu sendiri dalam menginput data.

Penelitian ini secara empiris bertujuan untuk melihat hambatan penerapan *e-Planning* yang diterapkan di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kurangnya pemahaman pegawai atau *user* OPD dalam menggunakan *e-Planning* mengakibatkan kurang terintegrasinya *e-Planning* antara sistem penganggaran dalam penginputan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) akibat lainnya program yang diusulkan kurang sesuai dengan pagu anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan terjadi karena adanya faktor perorangan, kelompok, dan organisasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **“Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penghambat Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 1.1. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Kegunaan Akademis :
  - a. Sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama;
  - b. Sebagai wujud pengembangan teori, praktek dan penambahan khazanah pengetahuan tentang sistem perencanaan yang lebih sistematis dan terintegrasi dan dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara khusus;
  - c. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi Kepustakaan Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, serta menjadi alternatif referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian evaluasi implementasi sistem perencanaan secara *online*.

2. Kegunaan Teoritis : untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama pada daerah yang berbeda.
3. Kegunaan praktis :
  - a. Untuk meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengarahkan dan menyediakan data dan fakta secara sistematis;
  - b. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan sistem *e-Planning* agar dapat melakukan perencanaan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

##### 2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Kebijakan pemerintahan dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat yaitu yang menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat, sedangkan para pejabat memfasilitasi proses dan kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat (Garrat, 2004: 48).

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, yang mana di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/negara (Toha, 2008: 88).

Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang tumbuh di negara-negara.

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010: 3).

Sementara itu, istilah Publik berasal dari Bahasa Inggris “*Public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku yang berarti umum, orang banyak, ramai. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2005: 6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomendasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain (Harbani Pasalong, 2007: 129).

Ratminto (2005: 23) mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sinambela, Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disertai kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut di atas diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ Satuan Organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi

penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005: 16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepsikan menjadi dua, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari tiga sudut pandang, sehingga menghasilkan tiga pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012: 20) yaitu :

a. Dilihat dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai;

b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok

orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya; dan

- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi di atas, maka timbul sebuah pertanyaan, siapakah orang-orang yang dimaksud dalam administrasi luas?

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam tiga definisi di atas menurut Anggara (2012: 21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator  
Yaitu orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan;
- b. Manager  
Adalah orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata;
- c. Pembantu Ahli (*staf*)  
Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (*brain-trust*) dan berfungsi di bidang karya;

d. Karyawan

Merupakan para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari definisi di atas, administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal di atas membukakan mata kita untuk lebih melihat terhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-menetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada di dalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, di mana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :

a. *Man*, yaitu Manusia;

Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM di dalam

suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.

b. *Money*, yaitu Uang;

Uang yang dimaksud di sini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan di dalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan finansial.

c. *Method*, yaitu Metode atau Cara;

Cara yang dimaksud di sini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.

d. *Machine*, yaitu Mesin;

Mesin yang dimaksud di sini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.

e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat;

Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud di sini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.

f. *Market*, yaitu Pasar;

Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6M di atas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil sekalipun yakni pemerintah desa.

Administrasi terbagi menjadi dua yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Administrasi publik (*public administration*) merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry, 2015: 14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3) juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personil publik memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi Publik, yang mana pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie, 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut D. Waldo (dalam Syafie, 2012: 21), administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik di atas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2.1.2. Teori Organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan

eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (2008: 6), yaitu : “Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu,

maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/ bagian.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi, 2015: 5) yaitu Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa bergoorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang berkerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettes (2005: 35), organisasi adalah sekumpulan individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur-unsurnya meliputi beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu;
- b. Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu;
- c. Dalam organisasi terdapat suatu stuktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi;

- d. Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang dirancang untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dalam Mulyadi, 2015), organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dari pada itu, Siagian (2003: 6) juga menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Isi daripada organisasi itu adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi di atas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti;
  - a. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (*group of people*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama;
  - c. Organisasi sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.
2. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Organisasi dipandang sebagai hierarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap

dewasa untuk menempatkan diri dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan Manajemen.

### 2.1.3. Konsep Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*.

Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Berikut pengertian implementasi dalam Buku Analisis Kebijakan Publik karya Subarsono (2007: 45);

1. Subarsono, menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan;
2. Solichin, menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan;

3. Pressman dan Wildavsky, menjelaskan implementasi adalah (*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu;
4. Wahab, menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan;
5. Dunn, menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya, implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta (Subarsono, 2007: 46).

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan (Subarsono, 2007: 47).

Dari paparan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan (Subarsono, 2007: 47).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam

penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni (Subarsono, 2007: 49) :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni (Subarsono, 2007: 49) :

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya adalah teori George C. Edward Edward III (dalam

Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi.

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi;

b. Sumberdaya.

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial;

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif;

d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181), sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Indikator implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Edward III, menurut Edward III implementasi mencakup indikator :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini adalah upaya organisasi membuat dan membangun sistem yang akan menjadi wadah pengembangan konsep implementasi yang akan dikembangkan;

b. Sumberdaya

Sumber daya dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang merupakan faktor penting dalam sistem komunikasi yang disebutkan sebelumnya;

c. Disposisi

Sumber daya dalam penelitian ini adalah modal sosial yang mengikat interaksi sistem komunikasi dan sumber daya dalam penanaman implementasi;

d. Struktur Birokrasi

Sumber daya dalam penelitian ini adalah susunan organisasi yang mengatur semua aktivitas program kerja dan implementasi program yang dicanangkan dalam sebuah organisasi.

#### 2.1.4. *E-Government*

*Electronic Government* atau *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.

Menurut Indrajit (2006: 11), dapat dilihat beberapa tipe hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. *Government to Citizen (G2C)* merupakan sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan;
2. *Government to Business (G2B)* yaitu sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya dari tipe hubungan ini adalah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis;
3. *Government to Government (G2G)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan;
4. *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah;
5. *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non-Profit, seperti NGO,

Partai Politik, dll. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing (Indrajit, 2006: 13).

Pentingnya *e-Government* salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Indrajit, 2006: 14).

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini (Indrajit, 2006: 14) :

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja;
2. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*;
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update;
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik;
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah;
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun *e-Government*. Berikut enam strategi pemerintah pusat dalam penyusunan *e-Government* (Al Fatta, 2009: 34), yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan;
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan *e-Government* sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah;
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan *e-Literacy* masyarakat;

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan (Al Fatta, 2009: 34).

Oleh karena itu seluruh pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun *e-Government*. Baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun setelah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota membangun *e-Government* muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan *e-Government* di tingkat daerah tersebut, yaitu (Al Fatta, 2009: 34) :

1. Aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam;
2. Belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah;
3. Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi;
4. Kapasitas *bandwidth* belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah;
5. Belum adanya pusat data (*data center*);
6. Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi;

7. Sebagian hak cipta dipegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi.

Permasalahan tersebut di atas menjadikan pengembangan dan pengelolaan *e-Government* menjadi tidak efektif dan efisien sehingga harus segera di atasi, karena *e-Government* seharusnya optimal dan bisa menjadi sarana pemerintah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan bukan sebaliknya, menjadi sesuatu yang membebani perekonomian. Dalam situasi saat ini, di mana perekonomian Indonesia telah terintegrasi dengan sistem perekonomian dunia (WTO), sistem perekonomian regional (ASEAN) yang mengedepankan prinsip liberalisasi, serta diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap kemampuan perekonomian Indonesia akan semakin berat (Al Fatta, 2009: 45).

Dalam situasi tersebut, sistem perekonomian Indonesia harus mampu melindungi segenap pelaku ekonomi di Indonesia, khususnya mereka yang kemampuan ekonominya lemah. Oleh karena itu, *e-Government* haruslah menjadi salah satu pranata yang dapat menguatkan kemampuan perekonomian Indonesia dan bukan malah menambah masalah (Sun'an Muammil & Senuk Abdurrahman, 2015: 67).

Berbagai peraturan yang melahirkan beraneka ragam sistem informasi yang harus diselenggarakan oleh instansi pemerintah tersebut menjadi penyebab permasalahan dalam bidang *e-Government*, karena tiap undang-undang seolah-olah memberikan semacam kekuasaan kepada instansi pelaksananya untuk

merancang, membangun, dan menyelenggarakan sistem informasinya secara sendiri-sendiri tanpa perlu terintegrasi dengan instansi selain dirinya. Persoalan-persoalan ini kemudian lahir ketika tiap-tiap instansi tersebut menetapkan kode pengumpulan data sendiri-sendiri, menetapkan format data sendiri-sendiri, membuat pusat data sendiri-sendiri, mengadakan bandwidth sendiri-sendiri, menggunakan program komputer dengan arsitektur tertutup dan/atau non-operabel dengan sistem lain, dan lain sebagainya (Sun'an Muammil & Senuk Abdurrahman, 2015: 67).

Koordinasi antar instansi juga menjadi sulit dilakukan, karena tiap-tiap instansi pelaksana dari suatu undang-undang tidak mau kewenangannya dikurangi atau diintervensi oleh instansi lain. Presiden sebagai kepala pemerintahan pada dasarnya telah berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membentuk Detiknas. Namun karena secara hierarki, peraturan yang membentuk Detiknas itu lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang, maka tidaklah mengherankan apabila Detiknas pun tidak berdaya dalam berhadapan dengan berbagai instansi pelaksana yang mengandalkan undang-undang sebagai landasan yuridisnya dalam bekerja (Sun'an Muammil & Senuk Abdurrahman, 2015: 67).

Dalam kaitannya dengan faktor kapasitas kelembagaan, penyebab permasalahan dalam bidang *e-Government* adalah tidak adanya keseragaman kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang *e-Government*. Pada tiap-tiap instansi pemerintahan, hampir setiap unit/satuan kerja dapat membuat sistem elektronik dengan menggunakan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah (Sun'an Muammil & Senuk Abdurrahman, 2015: 68).

Akibatnya, dalam satu instansi terdapat lebih dari satu sistem elektronik, padahal fungsi aneka sistem elektronik tersebut sama. Seharusnya agar efisien, harus ditegaskan mana unit/satuan kerja yang bertugas merancang, membangun, dan merawat sistem elektronik, serta mana unit/satuan kerja yang bertugas untuk menggunakan atau menyelenggarakan sistem elektronik (Adisasmita Rahardjo, 2013: 13).

Permasalahan lain juga lahir karena tiap-tiap unit/satuan kerja tersebut kemudian mengelola sumber daya manusianya secara sendiri-sendiri dan sporadis, sehingga jarang sekali sumber daya manusia di kalangan internal instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi profesional dalam menangani aneka tahapan penyelenggaraan *e-Government*. Kalaupun ada yang sudah berkualifikasi profesional, persoalan lain yang kerap timbul adalah rotasi personil, karena dalam kenyataannya seringkali sumber daya manusia di instansi pemerintah tidak diberikan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya (Adisasmita Rahardjo, 2013: 14).

Dalam kaitannya dengan faktor kepentingan, penyebab permasalahan dalam bidang *e-Government* adalah sikap dari pimpinan institusi pemerintahan yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di institusinya. Ada kemungkinan bahwa pimpinan institusi tersebut memiliki kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak mau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di institusinya. Padahal seharusnya setiap pimpinan institusi menyadari bahwa pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka manfaat positif lainnya (Fadlan Ahmad, 2020: 56).

Dengan mempertimbangkan pentingnya *e-Government* bagi perekonomian dan demokratisasi di Indonesia, dan urgensinya dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan internasional, serta mendesaknya persoalan inefisiensi yang harus segera di atasi, maka langkah yang perlu untuk segera dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang *e-Government* di tingkat daerah (Fadlan Ahmad, 2020: 56).

#### 2.1.5. Teknologi Informasi

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah Teknologi Informasi. Pada awalnya teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa pra-sejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini teknologi informasi terus terus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern.

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Bambang Warsita, 2008: 135).

Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat (Lantip dan Rianto, 2011: 4).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data (Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2011: 57).

Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya (Mc Keown dalam Suyanto, 2005: 10).

Teori yang lain juga diungkapkan, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi (Williams dalam Suyanto, 2005: 10).

Teori pendukung yang lain, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk *me-record*, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima informasi (Behan dan Holme dalam Munir, 2009: 31).

#### **2.1.6. Konsep Perencanaan**

Perencanaan memiliki peran strategis bagi kepentingan publik sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah. Pengertian perencanaan dan kegiatan

perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok, fungsi dan kedudukan perencanaan, serta perencanaan sebagai bagian dari proses publik. Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dengan dimensi waktu, spasial, serta tingkatan dan teknis perencanaannya.

Perencanaan Pembangunan menurut Arthur W. Lewis dalam era otonomi mendefinikasi perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih produktif.

BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. BAPPEDA merupakan unsur penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Beratnya tugas pokok dan fungsi yang diemban BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dapat diwujudkan melalui *Electronic Government for Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Hal ini bertujuan agar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan

dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan), Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-Perubahan) Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya hal apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam hal mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir, apabila rencana tersebut telah ditetapkan maka rencana tersebut harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin melakukan modifikasi agar tetap berguna. “Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci suksesnya pencapaian akhir. Oleh karena itu

perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Identifikasi prioritas dan menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan organisasi menggunakan sumber dayanya secara efektif.

Sejauh mana posisi organisasi dari tujuannya? Sumber daya-sumber daya apa yang tersedia untuk pencapaian tujuan? Hanya dengan menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan selanjutnya. Komunikasi yang terbuka dengan para anggota organisasi, data keuangan, dan statistik diperlukan pada tahap ini.

Dalam mencapai tujuannya, faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat membantu organisasi, dan faktor apa saja yang dapat menimbulkan masalah? Walaupun sulit dilakukan, antisipasi situasi, problem dan kesempatan yang mungkin terjadi di masa mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan dalam tiga hal. Pertama, waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Kedua, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan alternatif-alternatif, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan

memperhitungkan semua kemungkinan. Ketiga, jumlah atau rentangan waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan.

Demikian juga halnya dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana rencana jangka pendek (*short-range plans*) mencakup berbagai rencana dari satu hari sampai satu tahun; rencana-rencana jangka menengah (*intermediate-range plans*) mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai tiga tahun; dan rencana-rencana jangka panjang (*long-range plans*) meliputi kegiatan-kegiatan selama dua sampai lima tahun, dengan beberapa rencana yang diproyeksikan 25 tahun atau lebih dimasa yang akan datang. Perencanaan jangka panjang biasanya berkenaan dengan perencanaan strategik.

Karena jangka waktu yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lain, maka sulit menentukan cara tepat suatu rencana tertentu sebagai rencana jangka panjang, menengah atau pendek. Rencana juga berubah dari jangka panjang menjadi jangka pendek sesuai dengan perjalanan waktu. Faktor waktu lainnya yang mempengaruhi perencanaan adalah seberapa sering rencana-rencana harus ditinjau kembali dan diperbaiki. Hal ini tergantung pada sumber daya yang tersedia dan derajat ketetapan perencanaan manajemen. Hubungan yang sering dijumpai adalah apabila semakin panjang jangka waktu suatu rencana, maka semakin panjang periode untuk peninjauan kembali dan perbaikan. Juga, semakin penting rencana terhadap keberhasilan organisasi, semakin diteliti dan diperhatikan.

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Kata “program” dalam definisi tersebut menyangkut

suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang diperankan oleh manajer dalam perumusan strategi organisasi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya-sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

### 2.1.7. Sistem *E-Planning*

Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan Bahasa Yunani (*sustēma*) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah “sistem” sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata “sistem” mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Menurut Harijono Djojodihardjo, pengertian sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi. Sedangkan menurut Indrajit, sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

*E-Planning* atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah alat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Renja-OPD, dan RKPD agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

*E-Planning* menurut Silva adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi *virtual reality* dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional. *E-Planning* juga sering disinonimkan sebagai *e-Government* atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah (Wayan Dedi Juniawan, 2019: 34).

*E-Planning* juga diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-Planning* ini, diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-Planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem *on-line* dan *off-line*. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan profesional;
3. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah;
4. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam sistem aplikasi *e-Planning* terdapat 4 modul, diantaranya sebagai berikut :

1. Satuan Harga, yaitu aplikasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standard Biaya (ASB);
2. *E-Musrenbang*, yaitu aplikasi pelaksanaan rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD sampai dengan Penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) OPD;
3. *E-Pokir*, yaitu aplikasi pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Perencanaan Berkelanjutan, yaitu aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra dan Renja-OPD.

### 2.1.8. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi sistem *e-Planning* ini, maka penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian/jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar’ yang ditulis oleh Egis Teknotat Grandis.

Di mana hasil penelitian ini mengemukakan bahwa efektifitas sistem *e-Planning* program pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem *e-Planning* terkunci dan terdokumentasikan berupa *softcopy*, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya. Hal ini cukup direspon dengan baik oleh pegawai dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran, sehingga adanya kesinergisan antara sistem aplikasi lama dengan sistem aplikasi *e-Planning* yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* Pada Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)” oleh Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli.

Dengan hasil penelitian yaitu, masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik sumber daya manusia yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun sumber daya manusia yang mau berkonsentrasi di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara. Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* hanya bisa diakses di tempat tertentu saja yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Penelitian dengan judul “Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan *e-Planning* (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar)” oleh Wayan Dedi Juniawan.

Dengan hasil penelitian yaitu penyusunan perencanaan jangka menengah kabupaten Gianyar tahun 2018-2023 telah mengadopsi sistem perencanaan pembangunan terintegrasi sesuai yang dikemukakan oleh Geyer di mana setiap fasenya bersesuaian dengan tahapan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Setiap tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Permendagri tersebut sudah merupakan bagian dalam fase sistem perencanaan pembangunan terintegrasi, walaupun pada

setiap tahapannya tidak berurutan dalam setiap fase. *E-Planning* berperan pada fase nol (persiapan) dalam mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang diterapkan oleh peraturan, fase dua (strategi) pada saat pemasukan dan verifikasi usulan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta fase empat (integritas), yaitu mengintegrasikan misi, tujuan, sasaran, sampai pada program daerah dengan program pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Penelitian dengan judul “Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang” oleh Samsul Ma’arif, Pribadi Nugroho dan Lydiya Wijayanti.

Dengan hasil penelitian yaitu Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak.

5. Penelitian berjudul “Analisis Penerapan SIMRAL di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang” oleh Dian Purnama Sari Dhamayanti.

Di mana hasil penelitian yang diperoleh yaitu di mana deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori penerapan *e-Government*. Di mana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting

yang harus dipertimbangkan dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

6. Penelitian berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan” oleh Diana Rosalina Harahap, Badaruddin & R. Hamdani Harahap (2012). Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini BAPPEDA masih belum efektif dalam menerapkan sistem *e-Planning* karena tidak memenuhi variabel yang dijadikan syarat oleh Duncan. Adapun variable yang tidak terpenuhi adalah pencapaian tujuan dan juga adaptasi. Sementara variabel yang dipenuhi adalah integrasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memperbaiki penerapan sistem *e-Planning* sehingga bisa memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam pengukuran efektivitas Duncan.
7. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan” oleh Rahmadani (2020). Penelitian ini menemukan dalam penerapannya pemanfaatan sistem *e-Planning* sudah dilakukan dengan baik namun terdapat beberapa hambatan yaitu, sumber daya manusia yang belum merata pada perencanaan pembangunan daerah, inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi dan seringnya perubahan yang terjadi. Adapun cara BAPPEDA Kota Medan untuk mengatasi hambatan

tersebut dengan melakukan pelatihan, diberlakukannya *e-Planning* dan mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat.

8. Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo” oleh Mohamad Sukarno (2020). Hasil penelitian menunjukkan mplementasi kebijakan *e-Planning* pada BAPPEDA Kulon Progo telah sesuai dengan arahan PP No. 8 tahun 2008 akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala serta kekurangan tersendiri dari pengaplikasian seperti pengembangan jaringan informasi, proses input data, dan kesiapan dari sebuah sistem atau perangkat.
9. Penelitian yang berjudul “Penerapan *E-Planning* sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak” oleh Devita Dwi Maharani (2020). Hasil penelitian menunjukkan aplikasi *e-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *e-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalahantara lain server yang masih sering error dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat *login*, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemrograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik.

10. Penelitian yang berjudul “Penerapan *E-Planning* dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar”, oleh Nuravita, Winda (2018). Hasil penelitian menunjukkan Strategi perencanaan juga dilaksanakan dengan sistem perumpunan atau kerja sama tim, sehingga seluruh pegawai BAPPEDA ikut menjadi bagian dalam perencanaan menggunakan aplikasi *e-Planning*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggunaan *e-Planning* terdiri dari faktor pendorong atau pendukung dan faktor penghambat atau bisa lebih disebut dengan tantangan. Terdapatnya tantangan atau faktor penghambat tidak lekas menjadi penghambat dalam penerapan *e-Planning*. Justru dari adanya tantangan tersebut membuat pihak BAPPEDA lebih tertantang untuk berusaha memperbaiki sistem, cara penggunaan *e-Planning*, dan meningkatkan sumber daya manusianya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana isinya berupa penjelasan-penjelasan dari data yang ditemukan dilapangan saat observasi yang dipadukan dengan teori-teori yang ada.

## 2.2. Kerangka Berpikir

Berikut adalah gambaran dari hubungan variabel penelitian yang akan diteliti



1. Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah
2. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi
3. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

### 2.3. Konsep Operasional

Definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami disebut juga dengan konsep. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep dan agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian, yang mana konsep-konsep tersebut antara lain yaitu :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya;
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu;
3. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan;
4. Rencana adalah hasil dari proses perencanaan dokumen-dokumen yang menunjukkan berbagai detail konfigurasi ruang dan infrastruktur yang diinginkan dari perkembangan kota di masa depan;

5. *Planning* adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal;
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah;
7. Sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien;
8. *E-Planning* adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi *virtual reality*) dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian “Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” ini adalah indikator implementasi berdasarkan konsep George Edward III, antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Sosialisasi termasuk indikator komunikasi yang dioperasionalkan di dalam penelitian ini, di mana yang menjadi sub sosialisasi yaitu :

- a. Waktu Pelaksanaan;
  - b. Tempat Pelaksanaan;
  - c. Materi yang disampaikan;
  - d. Peserta Sosialisasi;
  - e. Biaya Sosialisasi;
  - f. Narasumber; dan
  - g. Media Sosialisasi.
2. Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program karena bagaimanapun

kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

Di mana sub indikator yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia, yaitu pendidikan terakhir yang dimiliki oleh implementor;
  - b. Kompetensi Sumber Daya Manusia, yaitu masa kerja, pengalaman kerja, serta pendidikan/pelatihan yang pernah diikuti oleh implementor;
  - c. Fasilitas atau Sarana/ Prasarana yang mendukung pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning* ini, sebagai contoh ruangan yang digunakan, peralatan yang memadai serta jaringan yang mendukung.
3. Sikap Pelaksana (Disposisi) berkenaan dengan kesediaan atau motivasi psikologis dari para implementor untuk menjalankan kebijakan publik tersebut, karena kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan.

Adapun indikator yang dioperasionalkan adalah :

- a. Sikap implementor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bagaimana kerjasama para implementor dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem *e-Planning*.

4. Struktur Birokrasi yang berhubungan dengan kemampuan dan kriteria organisasi pelaksana yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Berikut beberapa sub indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi sistem *e-Planning*;
- b. Konsisten pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning* dalam hal koordinasi dan kerjasama antara implementor.

#### 2.4. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 : Operasional Variabel Kegiatan Penelitian Implementasi Sistem *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solihin Abdul Wahab,2008: 65).	Implementasi	1.Komunikasi	Sosialisasi Sistem <i>e-Planning</i> a. Waktu Pelaksanaan b. Tempat Pelaksanaan c. Materi yang disampaikan d. Peserta Sosialisasi e. Biaya Sosialisasi f. Narasumber g. Media Sosialisasi
		2.Sumber Daya	1. Kualifikasi a. Pendidikan Terakhir  2. Kompetensi a. Masa Kerja b. Pengalaman Kerja c. Pendidikan/ Pelatihan  3. Fasilitas a. Ruangan b. Peralatan c. Jaringan
		3.Disposisi	1. Sikap implementor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Kerjasama implementor

			dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem <i>e-Planning</i> .
		4. Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan</li> <li>2. Berjalannya koordinasi dan kerjasama yang konsisten antara tim <i>e-Planning</i> dan pengguna.</li> </ol>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Afrizal, 2016: 13).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Sistem *e-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian

terletak di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Johari Dagang, Komplek Perkantoran Terpadu Dorak, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

### 3.3. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang belum diolah dan diterima langsung dari responden (Arikunto Suharsimi, 2010: 134). Data ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan, sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait pelaksanaan sistem *e-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang

kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto Suharsimi, 2010: 134).

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Bungin Burhan, 2011: 36).

Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan pelaksanaan penginputan *e-Planning*. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan Implementasi Sistem *e-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban

atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung (Suwartono, 2014: 50).

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun informannya berjumlah 12 orang yang terdiri dari beberapa orang pengguna sistem *e-Planning* yang bertugas sebagai pengawas ataupun admin, dan beberapa operator Organisasi Perangkat Daerah yang dipilih berdasarkan hubungan dan interaksinya dengan pemerintahan desa dan masyarakat secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1** Daftar Informan Penelitian “Implementasi Sistem *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”

No	Pengguna <i>e-Planning</i>	Jumlah
1	Sekretaris Badan	1
2	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	1
3	Admin Pusat <i>e-Planning</i>	1
4	Admin Bidang <i>e-Planning</i>	2
5	Operator Sistem <i>e-Planning</i>	1
6	Tim Pengembang Sistem <i>e-Planning</i>	
	a. Analis Sistem	1
	b. Ahli Database	1
7	OPD Pengguna <i>e-Planning</i>	
	a. Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti	1
	b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti	1
	c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	1
	<b>Total</b>	<b>11</b>

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning*, di antaranya: dasar hukum yang mengatur tentang sistem *e-Planning*, dokumen laporan pelaksanaan sistem *e-Planning* di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, dan foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan *e-Planning*.

#### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Yin, Robert. K, 2009: 68).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin,

teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Analisis data versi Miles dan Huberman (2005: 45), bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan.

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi;

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa

dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Ringkas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri bersamaan dengan mekarnya Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Desember 2008. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 4.2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Struktur atau susunan organisasi di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari beberapa bagian dan bidang seperti yang dapat dilihat berikut ini :

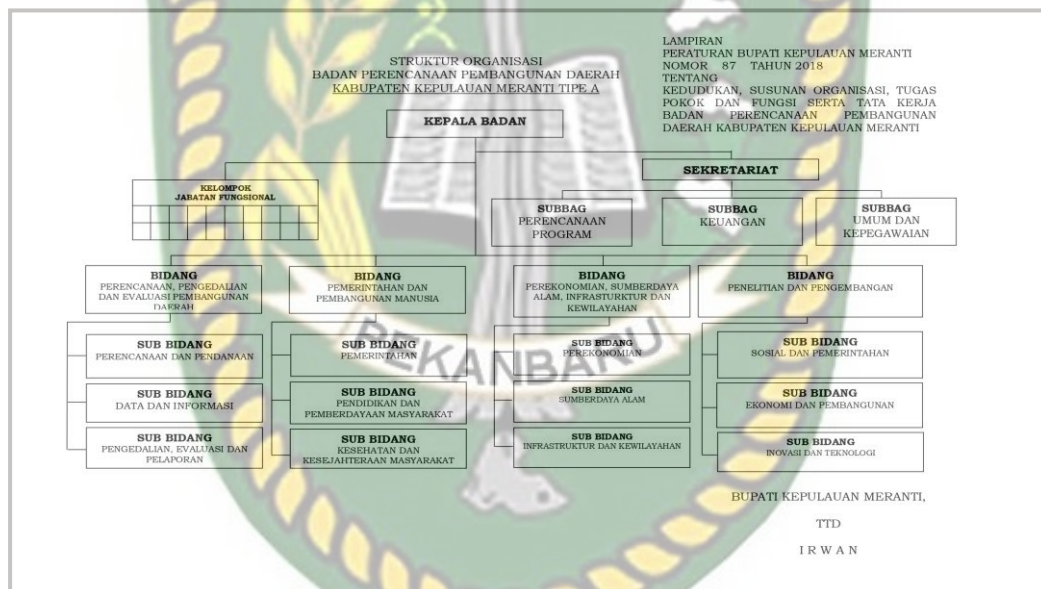
1. Kepala;

2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang PPE), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bidang PPM), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (Bidang PSIK), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perekonomian;
  - b. Sub Bidang Sumberdaya Alam; dan
  - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bidang LITBANG), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dapat dilihat Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut dibawah ini :



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

#### 4.3. Fungsi dan Tugas Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugasnya, melakukan beberapa fungsi sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.4. Sumber Daya Organisasi**

Sumber daya organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai yang berkualitas dan profesional sangat diharapkan untuk mempercepat dan menjamin tercapainya tujuan dan fungsi organisasi yang ditetapkan.

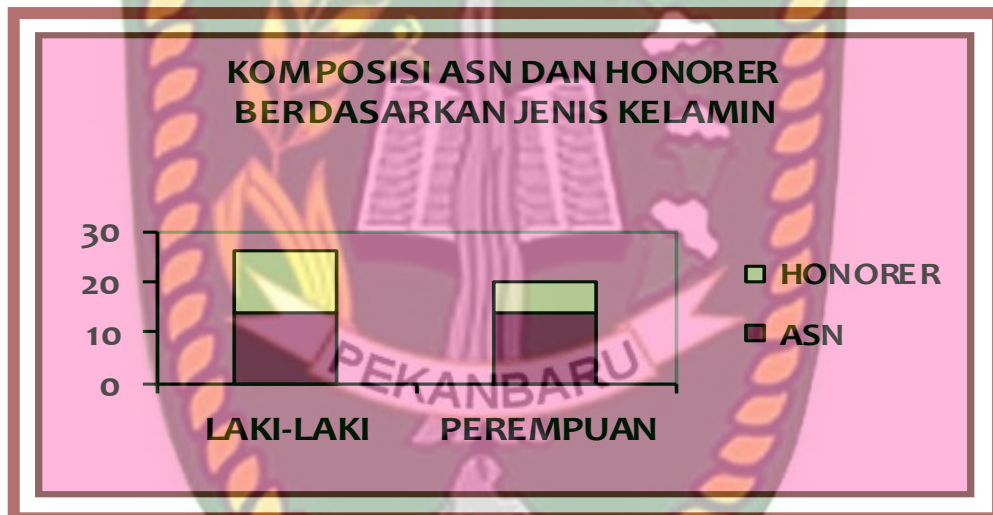
Sumber Daya Manusia atau SDM juga memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan di dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut SDM yang handal juga merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

**Tabel 4.1. Pembagian Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan**

Sesuai Jabatan		Sesuai Pendidikan	
Eselon II.b	: 0 Orang	Strata Tiga	: 0 orang
Eselon III.a	: 1 Orang	Strata Dua	: 6 Orang
Eselon III.b	: 4 Orang	Strata Satu	:17 Orang
Eselon IV.a	: 14 Orang	Diploma	: 0 Orang
Eselon IV.b	: 0 Orang	Diploma III	: 4 Orang
Fungsional Tertentu	: 0 Orang	SLTA/sederajat	: 1 Orang
Fungsional Umum	: 9 Orang	SLTP/sederajat	: 0 Orang
Tenaga Harian Lepas	: 18 Orang	SD/sederajat	: 0 Orang

Pelaksanaan roda organisasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh 28 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 orang Tenaga

Harian Lepas (THL) atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Honorer. Sedangkan berdasarkan komposisi laki-laki dan perempuan, terdiri dari 14 orang (50%) ASN laki-laki dan 14 orang (50%) ASN perempuan, dan untuk Tenaga Honorer terdiri dari 12 orang laki-laki (66,67%) dan enam orang perempuan (33,33%). Secara ringkas kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti seperti disajikan pada gambar di bawah ini:



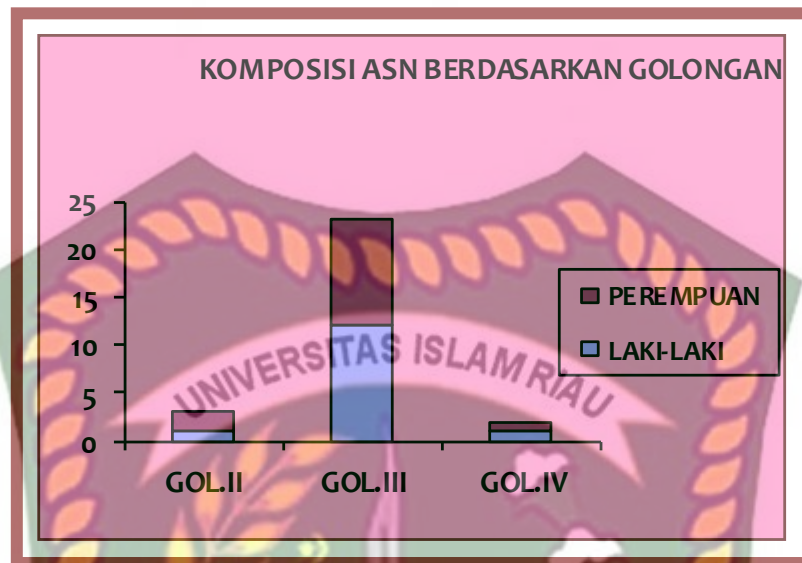
**Gambar 4.2. Komposisi ASN dan Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jenis Kelamin**



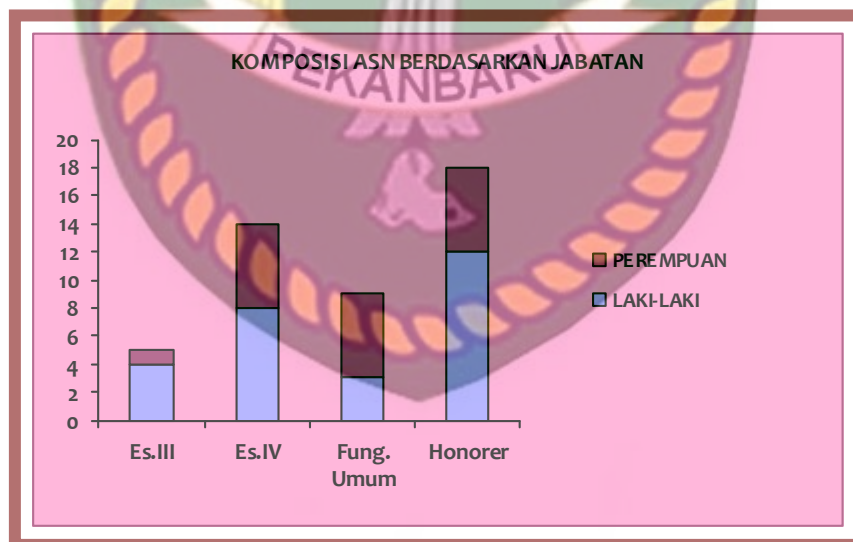
**Gambar 4.3. Komposisi ASN dan Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan ASN BAPPEDA adalah pendidikan Strata Dua (S-2) sebanyak tujuh orang (15,21%), Strata Satu (S-1) sebanyak 20 orang (43,47%), kemudian pendidikan diploma (D-III) sebanyak lima orang (10,87%), SLTA/ sederajat sebanyak 12 orang (26,09%), SLTP/ sederajat sebanyak satu orang (2,17%) dan SD/ sederajat sebanyak satu orang (2,17%), di mana untuk tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA hampir semuanya merupakan THL.

Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum.



**Gambar 4.4. Komposisi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Golongan**



**Gambar 4.5. Komposisi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan**

Kantor BAPPEDA terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Johari Dagang dengan luas bangunan 510 m<sup>2</sup>. Untuk menunjang kinerja pelayanan ASN di lingkungan Kantor BAPPEDA, sarana dan prasarana kerja disebar di sekretariat dan bidang-bidang. Adapun kondisi keadaan sarana dan prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2. Sarana dan prasarana kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan	
1	Kendaraan Roda Empat	2		
2	Kendaraan Roda Dua	17		
3	Gerobak Dorong	3	2	Rusak
4	GPS	2		
5	Mesin Tik	2	2	Rusak
6	Mesin Foto Copy	1		
7	Lemari Besi	29		
8	Filling Kabinet	36		
9	Brankas Besi	1		
10	Lemari kayu	15	6	Rusak
11	Lemari Kaca	2		
12	Lemari Makanan	2	1	Rusak
13	Lemari Buku	5		
14	Rak Besi Arsip	1		
15	Whiteboard	5	1	Rusak
16	Papan data	2		
17	Mesin Penghancur Kertas	5	2	Rusak
18	Papan Nama Instansi	1		
19	Papan Nama Satuan	1		

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
20	Kursi Putar	104	7 Rusak
21	Kursi Tamu	4	
22	Kursi Rapat	135	4
23	Kursi Lipat	1	Rusak
24	Meja	83	16
25	Meja Rapat	28	2
26	Karpas	2	Rusak
27	Gorden	1	Rusak
28	Rak TV	2	
29	Pot Bunga	30	
30	Partisi	1	
31	Kursi Ruang Tunggu	1	
32	Meja Kerja Kepala Badan	1	
33	Meja Satpam	1	
34	Meja Kerja Sekretaris	1	
35	Meja Kerja kasubbid	15	
36	Lemari Panjang	1	
37	Vacum Cleaner	1	
38	Mesin Potong Rumput	2	
39	Kipas Angin	5	
40	Lemari Es/Kulkas	2	
41	AC	11	5
42	Rak Piring	1	
43	Wastafel Rak Piring	1	Rusak
44	Dispenser	7	
45	Televisi	5	2 Rusak
46	Tangga	3	1
47	Handycam	1	Rusak

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
48	UPS	31	Rusak
49	Wireles	1	Rusak
50	Sound Sistem	1	Rusak
51	Stabilizer	3	
52	Filter Air	1	
53	Tabung Pemadam Kebakaran	11	
54	Komputer PC	39	14
55	Laptop	34	18
56	Hard disk Eksternal	31	Rusak
57	Printer	60	43 Rusak
58	Modem USB+Sim Card	11	
59	Intercom	11	Rusak
60	Proyektor/LCD	8	4
61	Kamera Digital	6	6
62	CCTV	14	Rusak
63	Parabola/Reciever	1	Rusak
64	Alat Peraga	1	
65	Sentelop/senter	3	Rusak
66	Pentungan	1	
67	Jaket	1	Rusak
68	Sangkur	4	Rusak
69	Meja Tennis Meja	2	1 Rusak

**Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pendukung terlaksananya operasional kantor dengan baik telah cukup memadai.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian, sebab dengan mengetahui subjeknya, peneliti dapat mengetahui siapa yang akan memberikan peneliti data dan informasi. Dalam penelitian “Implementasi Sistem *e-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” ini, subjek penelitian yang disebut juga sebagai informan terdiri dari 11 orang informan yang memiliki keterkaitan secara langsung dalam pelaksanaan sistem *e-Planning* di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti selaku penanggungjawab pelaksana sistem *e-Planning* dan pembuat kebijakan terkait perubahan yang terjadi dalam implementasi sistem *e-Planning* ini.
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kepulauan Meranti, sebagai pengawas dalam evaluasi pelaksanaan sistem *e-Planning*.
3. Admin Pusat *e-Planning* yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah beserta Kepala

Sub Bidang dan staf intinya, terkecuali Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan wawancara pada salah seorang admin pusat saja.

4. Admin Bidang *e-Planning* yang terdiri dari dua bidang, yaitu :
  - a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), yang berjumlah empat orang terdiri dari satu orang Kepala Bidang dan tiga orang Kepala Sub Bidang;
  - b. Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSIK), yang berjumlah empat orang terdiri dari satu orang Kepala Bidang dan satu orang Kepala Sub Bidang;

Dalam penelitian ini hanya dilakukan wawancara pada salah seorang admin bidang saja pada masing-masing bidang.

5. Operator Sistem *e-Planning* sebanyak dua orang yang memverifikasi penginputan data oleh OPD secara global.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan wawancara pada salah seorang operator saja.

6. Tim Pengembang Sistem *e-Planning* yang berjumlah tiga orang, antara lain, yaitu :
  - a. Analis Sistem bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan rekomendasi pemilihan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem;

- b. Ahli Database bertanggung jawab dalam mengelola basis data dan informasi yang tersimpan secara sistematis sehingga bisa digunakan secara efektif dan efisien;
- c. Programmer bertanggung jawab dalam memperbaiki dan memelihara kode pemrograman serta keamanan, dengan mengubah password secara periodik, dan penanganan permasalahan dan keluhan penggunaan sistem.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan wawancara pada Analis Sistem dan Ahli Database saja.

7. *User* OPD yang menggunakan dan melaksanakan implementasi sistem *e-Planning* ini, dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap operator yang melakukan penginputan ke dalam sistem *e-Planning* di Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Sekretariat Dewan (Setwan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

## 5.2. Implementasi Sistem *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

### 5.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan publik. Di mana, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Begitu juga dengan kejelasan komunikasi yang diterima oleh implementor harus jelas dan perintah yang diberikan juga tidak sering berubah-ubah. Dalam implementasi sistem *e-Planning*, komunikasi adalah salah satu faktor penting yang mendukung efektifnya sistem yang digunakan. Berikut adalah tanggapan dari informan penelitian :

“Implementasi Sistem *e-Planning* sudah dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakannya. Aplikasi ini kan diluncurkan pada akhir tahun 2016 ya. Jadi tahun 2017 itu ada sosialisasi yang dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. adapun narasumbernya itu dari tim BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung ya. Ada tim IT nya. Untuk peserta itu seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, saat itu sosialisasinya secara langsung atau tatap muka”. (Wawancara bersama Batam Saputra, Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari penuturan yang disampaikan oleh Batam di atas, didapatkan informasi bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan sosialisasi terkait aplikasi sistem *e-Planning*. Adapun sosialisasi tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan menggunakan aplikasi sistem *e-Planning* tersebut. Hal yang sama juga turut disampaikan oleh informan berikut ini :

“Sepengetahuan saya selama di BAPPEDA terkait *e-Planning* ini sudah dilakukan sosialisasi ya. Ini kebetulan *e-Planning* sampai tahun 2021 ini *e-Planning* ini dibangun oleh internalnya BAPPEDA. Menggunakan jasa atau narasumber dari lingkungan akademisi atau pihak ketiga. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk internal BAPPEDA dulu ya. Setelah itu baru ke OPD daerah. Kalau awal-awal tentu ada beberapa tahapan ya. Mereka juga menyesuaikan diri ya. Kita adakan juga simulasi untuk mensosialisasikan lebih lanjut. Jika kasubagnya belum berganti mungkin mereka sudah mahir ya. Namun kan pasti ada pembaruan anggota ya. Tentu sebuah program pasti ada ya perubahan anggotanya”. (Wawancara bersama Erwin Suhanda, Admin Bidang PPM, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa selaku admin bidang PPM beliau turut mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan juga menyampaikan bahwasanya *e-Planning* dibentuk oleh internal BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, jadi ketika diadakan sosialisasi maka narasumbernya adalah dari tim internal BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri dengan bantuan pihak akademisi.

Erwin selaku informan menyampaikan bahwa pada awal mula sistem *e-Planning* diperkenalkan memang ada kendala seperti susah nya OPD beradaptasi. Namun kendala tersebut bisa di atasi seiring waktu berjalan. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Sosialisasi ada ya. Itu setiap tahun memang ada disosialisasikan. Karena setiap tahun ada pengembangan-pengembangan ya. Jadi selalu disosialisasikan. Untuk sosialisasi itu tatap muka secara langsung dan mungkin untuk beberapa tahun terakhir ini diadakan secara *zoom meeting* juga ya. Setau saya narasumber itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung. Peserta pastinya OPD ya se-Kabupaten Kepulauan

Meranti”. (Wawancara bersama Akmal Fuadi, Analis Sistem Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Dari penuturan Akmal di atas diketahui bahwasanya sosialisasi dalam pengenalan sistem *e-Planning* dilakukan secara tatap muka pada umumnya. Hal yang sama juga turut disampaikan oleh informan berikut :

“Kalau sosialisasi ada. Itu setiap tahun dan setiap ada pembaharuan fitur kita sosialisasikan ya. Untuk sosialisasi itu bisa tatap muka dan tentunya melibatkan semua OPD. Dalam sosialisasi itu tidak ada pungutan biaya. Itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung ya”. (Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan Sakinul Wadi diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti selalu mengadakan sosialisasi terkait adanya pembaruan sistem atau pembaruan fitur. Hal ini dilakukan agar pengembangan aplikasi yang dilakukan tersampaikan dengan baik kepada semua OPD dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal yang sama turut diutarakan oleh informan berikut :

“Sosialisasi ada. Hasil dari sosialisasi pun sepertinya sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait ya. Buktinya itu semua OPD sudah menerapkan sistem *e-Planning* dengan baik”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Ahli Database Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Dalam wawancara di atas informan menyampaikan bahwasanya sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan tersampaikan dengan baik serta dinilai tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan sudah diimplementasikannya sistem

*e-Planning* oleh semua OPD. Hal yang sama turut disampaikan oleh informan berikut :

“Untuk sosialisasi ada, itu diwadahi oleh BAPPEDA ya. Untuk pelaksanaannya itu ada yang secara tatap muka dan ada yang secara *zoom meeting*”. (Wawancara dengan Tabrani, Admin Pusat *e-Planning*)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas didapatkan informasi bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sosialisasi terkait pengembangan aplikasi sistem *e-Planning* melalui tatap muka dan *zoom meeting*.

Selanjutnya informan berikut juga menuturkan pendapat yang sama :

“Saya bergabung itu kan tahun 2018 ya. Itu sudah ada sosialisasi. Dari pantauan saya sosialisasi rutin dilakukan. Baik secara tatap muka maupun *zoom meeting*”. (Wawancara dengan Ahmad Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti)

Wawancara bersama Ahmad Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti di atas didapatkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti rutin dan aktif melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sistem *e-Planning*. Pendapat ini dibenarkan oleh informan berikut ini :

“Untuk sosialisasi itu sudah ya. Sosialisasi juga tersampaikan dengan baik kepada semua pengembang, operator dan OPD. Ini artinya tahapan sosialisasi sudah dilakukan dengan baik karena buktinya semua pihak terkait sudah menerapkan *e-Planning* dengan baik”. (Wawancara dengan Rian Hidayat, Operator Sistem *e-Planning*)

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh informan berikut :

“Untuk sosialisasi sudah dilakukan ya. Itu kalau tidak salah pada tahun 2018. Sosialisasinya dilakukan di ruang rapat BAPPEDA. Adapun narasumbernya ketika itu adalah tim teknis *e-Planning*. Untuk peserta setau saya semua OPD ya dan juga staf pejabat BAPPEDA yang bersangkutan. Ketika itu sosialisasi dilakukan secara tatap muka”. (Wawancara dengan Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari penuturan informan di atas, penulis menangkap bahwa setiap OPD menerima sosialisasi dalam waktu yang berbeda-beda. Dari awal implementasi *e-Planning* di tahun 2017, setiap OPD mendapatkan sosialisasi yang berbeda-beda. Ada yang mendapat sosialisasi dari awal *e-Planning* diimplementasikan BAPPEDA dan ada juga seiring pengembangan *e-Planning* dilakukan. Hemat peneliti tersebut didukung oleh tanggapan informan berikut ini :

“Kalau sosialisasi sudah ya, ketika mendapatkan sosialisasi saat itu di tahun 2016. Itu di BAPPEDA dilantai dua. Adapun narasumbernya itu adalah tim ahli atau tim IT dari Naga Sakti ya. Jadi pihak ketiga gitu”. (Wawancara dengan Khairi, Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang PPE, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara di atas, diketahui bahwa narasumber dalam sosialisasi *e-Planning* adalah dipimpin dan diarahkan langsung oleh tim ahli atau tim IT *e-Planning* BAPPEDA, dengan didampingi oleh pihak ketiga dari Naga Sakti. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau sosialisasi itu diadakan setiap tahun oleh BAPPEDA. Jadi setiap ada pengembangan itu disosialisasikan. Untuk sementara sejak ada *COVID* ini sosialisasi diadakan dalam bentuk *zoom meeting*”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo, Admin Bidang PSIK, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari hasil analisa wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tersampaikan dengan baik dan sudah memenuhi kriteria komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan penggunaan sistem *e-Planning*.

### 5.2.2. Sumber Daya

Sumber daya menurut Edward III merupakan hal yang penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, di mana salah satu indikator sumber daya adalah ketersediaan sumber daya utama yaitu, staf atau pegawai, dan fasilitas lain yang mendukung pelaksanaan implementasi yang dalam penelitian ini berkenaan dengan Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam Implementasi Sistem *e-Planning* Pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, perkembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur krusial dalam pengembangan dan pengoperasian sistem. Berikut tanggapan informan terkait hal tersebut :

“Saya pendidikan terakhir itu S1 Akuntansi ya. Saya bekerja dan menggunakan sistem *e-Planning* itu sudah hampir lima tahun ya. Sejak 2017 kan ini sudah diimplementasikan, nah dari semenjak itu lah sepertinya. Kalau pengalaman saya pribadi sebagai *user*, *e-Planning* kan secara umum diperuntukkan untuk penganggaran ya. Penganggaran itu kan ada kalender-kalender penganggarnya ya, atau ada tahapan-tahapan dalam penganggaran ya. Ada target-targetnya lah ya, jadi dengan *e-Planning* ini kita sudah terstruktur gitu ya. OPD ini sudah terjadwalkan, jadi memudahkan kami menyusun anggaran. Kalau untuk kendala

mungkin lebih ke jaringan ya. Karena aplikasinya dibantu jaringan internet ya. Jika jaringan bagus Insya Allah tidak ada masalah ya. Untuk pendidikan dan pelatihan khusus memang tidak ada ya. Sejauh ini dari tim BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti kualitasnya sudah sangat bagus ya. Misalkan kami mendapatkan kendala dalam pengaplikasian *e-Planning* lalu kami bertanya ke BAPPEDA SDM-nya sudah sangat bagus ya. Dan mereka cepat tanggap juga”. (Wawancara bersama Batam Saputra, Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas, informan adalah salah satu *user e-Planning*. Batam menuturkan bahwa sudah bergabung dengan tim *e-Planning* sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 sangat banyak pengalaman yang mungkin sebagian besar adalah pembelajaran bagi OPD dan *user* khususnya.

Menurut informan penelitian, pengalaman terbaik yang didapatkan oleh OPD dari sistem *e-Planning* adalah terbantunya penyusunan anggaran yang telah terjadwalkan melalui *e-Planning*. Menurut informan, sistem *e-Planning* sangat memudahkan *user* dan OPD dalam penyusunan anggaran. Memang pada awal implementasinya setiap *user* dan OPD merasa kesulitan karena masih dalam tahap penyesuaian, namun seiring waktu OPD merasa sangat terbantu dengan sistem *e-Planning*.

Dalam praktik penggunaan sistem *e-Planning*, OPD memang tidak mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan khusus. Dari informasi yang didapatkan, OPD mengikuti arahan dan petunjuk penggunaan dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat sosialisasi aplikasi dilakukan. Jadi OPD lebih sering mengacu kepada buku panduan penggunaan. Batam Saputra menuturkan bahwa tim nya secara teknis sudah memahami pengoperasian sistem *e-Planning*.

Selain itu menurut Batam Saputra sebagai *user*, mereka sering meminta pendapat admin *e-Planning BAPPEDA* jika ada *missing* sistem, dan pengakuan dari informan ini, menurut beliau SDM *e-Planning BAPPEDA* Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sangat baik. Berikut pula penuturan dari Erwin Suhandha selaku Admin Bidang PPM :

“Saya sendiri berlatar belakang pendidikan S2 Ekonomi Pembangunan ya. Saya sudah bergabung dengan tim *e-Planning* itu sejak tahun 2017 jadi sudah mau lima tahun kerja. Untuk pelatihan itu dari pihak kantor saja ya. Kalau berkiblat ke kementerian atau ranah provinsi itu tidak ada. Tapi ada pihak ketiga, seperti dari akademisi ya. Selama menjadi admin PPM, menurut saya OPD nya kurang bertanggung jawab saja ya. Ya seperti mereka selalu telat dalam mengirimkan rancangan-rancangannya begitu ya. Secara keseluruhan tim sudah oke sih”. (Wawancara bersama Erwin Suhandha, Admin Bidang PPM BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas, informasi yang didapat adalah informan merupakan salah satu admin bidang dalam hal ini bidang PPM BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Erwin sendiri sudah bergabung dalam tim *e-Planning* semenjak sistem tersebut digunakan pada tahun 2017. Erwin sendiri adalah lulusan Magister Ekonomi Pendidikan, artinya sebagai admin bidang beliau memiliki kompetensi yang bagus. Informasi dari Erwin Suhandha, semenjak aplikasi digunakan sebagai sistem pendukung perencanaan, tidak ada pelatihan khusus untuk *user* maupun admin.

Tim sistem *e-Planning* diarahkan langsung dari kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun Erwin membenarkan ada pihak ketiga seperti akademi. Menurut beliau kualitas SDM pengguna dan pengembang *e-Planning* sudah bagus. Hal yang sama juga dituturkan oleh informan berikut :

“Untuk latar belakang pendidikan saya itu sarjana, saya sudah bergabung dengan tim *e-Planning* ini dari tahun 2017. Jadi sudah hampir 5 tahun ya. Kalau SDM di dalam sistem sudah cukup. Kalau di luar sistem itu masih kurang karena mereka punya pekerjaan lainnya ya. Saya sebagai pengembang sistem tentu berharap seperti adanya penambahan SDM ya”. (Wawancara bersama Akmal Fuadi, Analis Sistem Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Dari wawancara bersama informan di atas diketahui bahwa Akmal Fuadi berlatar belakang pendidikan Sarjana. Dari wawancara bersama Akmal Fuadi menuturkan bahwa SDM dalam sistem *e-Planning* sudah bagus. Namun disayangkan dalam praktiknya masih banyak OPD yang kurang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Informan juga menuturkan bahwa akan sangat bagus jika ada penambahan SDM di dalam pengembangan sistem *e-Planning*. Berikut pula tanggapan dari Muhammad Sakinul Wadi :

“Saya berlatar belakang pendidikan S1 Hukum Tata Negara ya. Untuk pelatihan memang saya tidak ada mengikuti ya. Karena di sini posisi saya adalah pembuat kebijakan, di mana kebijakan ini nantinya akan diteruskan melalui IT dan akan di masukkan dalam fitur-fitur yang ada di dalam sistem *e-Planning* itu sendiri. Kalau menurut saya SDM pengguna atau pengoperasionalnya sudah bagus ya. Sudah memadai, memang ada beberapa orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menggunakannya ya. Akibatnya sering terlambat dalam pelaporannya. Kemudian, sebetulnya persoalan lebih besar adalah menindaklanjuti arahan pimpinan itu masih terkendala ya”. (Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Informan dalam wawancara menerangkan bahwa kualitas pengguna *e-Planning* sebenarnya sudah sangat bagus. Namun disayangkan ada beberapa pihak yang belum bersungguh-sungguh dalam penggunaan sistem *e-Planning*. Padahal sistem *e-Planning* diperuntukkan sebagai media yang dapat membantu

mempercepat proses perencanaan pada OPD. Selain itu SDM juga masih banyak yang belum mampu menerima dan menindaklanjuti instruksi dari pimpinan sehingga banyak proses kerja yang terkendala dan tidak tuntas.

Sakinul Wadi sendiri bertugas sebagai pembuat kebijakan yang akan diteruskan kepada pihak IT, oleh pihak IT nantinya instruksi dari kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam fitur sistem *e-Planning*. Oleh sebab itu Sakinul Wadi juga memantau kinerja dari pengguna dan pengembang sehingga ditemukan adanya beberapa orang yang belum bersungguh-sungguh dalam penggunaan sistem *e-Planning*. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Untuk pendidikan saya itu S2 Ilmu Komputer, saya mulai bergabung itu sejak tahun 2019. Jadi ada 2 tahunan ya saya bergabung dengan tim. Kalau untuk pelatihan memang tidak ada ya, namun kalau sosialisasi regulasi kami selalu diikuti. Tapi itu tidak ada sertifikat ya. Kalau untuk kompetensi SDM sebenarnya sudah cukup ya, namun untuk pengetahuan dasar masih kurang ya. Seperti kualitas itu perlu ditingkatkan. Kemudian untuk beban tugas sebenarnya tidak sesuai dengan jumlah SDM, karena misalkan ada instruksi hari ini, itu besok harus siap. Jadi kami sering ada penambahan kerja di malam hari”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Staf Ahli Database Tim Pengembang sistem *e-Planning*)

Iman Firdaus diketahui berlatar belakang pendidikan magister ilmu komputer, oleh karena itu sebagai staf ahli database beliau sudah memiliki kompetensi sumber daya manusia yang sudah sangat bagus dalam sistem *e-Planning* BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

Iman Firdaus juga menuturkan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk pengembang ataupun OPD. Namun dalam sosialisasi regulasi baik pengembang maupun OPD Kepulauan Meranti selalu diikutsertakan. Untuk sumber daya pengguna sistem *e-Planning*, menurut informan, staf dan tim harus memiliki

kompetensi dasar dari ilmu komputer. Selain itu jumlah SDM tidak sesuai dengan beban tugas dalam sistem *e-Planning*. Sebagai contoh adalah tim pengembangan harus kejar waktu dan bahkan sering harus lembur untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikut pula tanggapan dari informan lainnya :

“Untuk pendidikan saya itu S1 Teknik Informasi, salah satu kendala dalam SDM saat ini yaitu pada OPD ya. Karena sering terjadi mutasi. Sehingga anggota atau tim mereka nantinya tidak memahami sistem *e-Planning* ini. Kami sangat berharap OPD memiliki admin yang khusus membidangi sistem aplikasi ini”. (Wawancara dengan Tabrani, Admin Pusat Sistem *e-Planning*)

Tabrani adalah admin pusat sistem *e-Planning*. Dari wawancara bersama Tabrani diketahui beliau berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik Informasi. Jadi sebagai tim dan admin pusat sistem *e-Planning* Tabrani sudah memiliki indikator SDM yang kompeten di bidangnya.

Dalam wawancara bersama Tabrani juga didapatkan temuan bahwa masalah SDM dalam pengoperasian *e-Planning* lebih ke pihak OPD, inti masalahnya adalah karena pada OPD sering terjadi mutasi sehingga tim baru akan kembali menyesuaikan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam penggunaan sistem *e-Planning*. Menurut Tabrani akan sangat bagus jika OPD memiliki satu orang khusus yang memegang dan sangat paham mengenai aplikasi *e-Planning* ini. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Saya sendiri belatar belakang pendidikan S1 Komputer. Saya bergabung sebagai user *e-Planning* itu sejak dua tahun lalu. Kalau mengikuti pelatihan tidak pernah ya. Namun kalau sosialisasi sering ya. Kalau untuk SDM saya rasa cukup bagus ya. Namun masalah yang saya lihat itu pada seringnya terjadi mutasi ya. Jadi ini yang membuat banyak pekerjaan OPD cenderung melambat ya”. (Wawancara dengan Ahmad

Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Baidowi selaku Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui beliau berlatar belakang pendidikan S1 Komputer. Menurut Baidowi beliau tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus sebagai *user e-Planning*. Namun untuk sosialisasi memang rutin didapatkan.

Ahmad Baidowi juga menuturkan bahwa untuk SDM sebenarnya sudah sangat bagus. Hanya saja kendala dalam SDM itu terlihat pada seringnya terjadi mutasi dalam OPD. Sehingga anggota baru akan kembali melakukan penyesuaian tugas dan pengetahuan mereka sebagai *user e-Planning*. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikut :

“Saya pribadi itu belatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya sendiri sudah bergabung sejak tahun 2018 ya. Untuk pengalaman selama bergabung sebagai operator mungkin lebih ke banyaknya pengetahuan dalam perencanaan yang saya dapatkan. Untuk SDM, itu ada sedikit masalah seperti banyaknya OPD yang masih tertatih-tatih dalam memahami aplikasi sistem *e-Planning* ya. Karena kan banyak juga kasubbag yang sering berganti sehingga itu menjadi kendala ya”. (Wawancara dengan Rian Hidayat, Operator Sistem *e-Planning*)

Dari hasil wawancara bersama Rian Hidayat diketahui bahwa beliau berlatar belakang pendidikan Sekolah Kejuruan dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Artinya Rian memiliki kompetensi yang bagus sebagai operator sistem *e-Planning*. Dari Rian diketahui juga beliau sudah bergabung dalam tim sejak

tahun 2018. Penuturan dari Rian sendiri yaitu beliau mendapatkan banyak pengalaman dalam bidang perencanaan.

Rian juga pernah mengikuti pelatihan provinsi dan daerah namun belum ada sertifikasi. Dari penuturan Rian, diketahui bahwa sebenarnya SDM untuk *e-Planning* sudah bagus namun masalahnya lebih terlihat pada mutasi yang sering terjadi pada OPD. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Saya tamatan D3 Manajemen Informatika. Saya menggunakan sistem *e-Planning* sudah empat tahun ya. Kalau pengalaman yang saya dapatkan pastinya lebih banyak pengetahuan baru dalam bidang perencanaan ya. Kalau pelatihan ada saya ikut dua kali tapi tidak ada sertifikasi. Saran saya kualitas saja sih yang lebih ditingkatkan”. (Wawancara dengan Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara bersama informan di atas, diketahui bahwa umumnya pengelola *e-Planning* memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang komputer. Sehingga ini memberikan dampak baik dalam pengembangan *e-Planning*. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau saya tamatan S1 Administrasi Negara. Di bidang *e-Planning* saya ada lima tahun ya. Menurut saya kelebihanannya perencanaan lebih terarah, peninjauan lebih mudah dan intinya sesuai alurnya. Kekurangannya saat ini adalah pada efek mutasi ya. Justru efek mutasi ini menghambat efisiensi waktu pelaporan setiap OPD”. (Wawancara dengan Khairi, Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang PPE, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara bersama informan di atas, diketahui bahwa kendala sumber daya manusia dalam penggunaan sistem *e-Planning* saat ini yaitu sebagai efek mutasi kepala sub bagian program dan

perencanaan setiap OPD. Hal ini menyebabkan kasubbag baru harus memiliki pemahaman baru dalam pengelolaan sistem *e-Planning*. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Saya sendiri tamatan S1 Teknik. Menggunakan *e-Planning* sudah 3 tahun ya. Khusus pelatihan dan pendidikan mengenai *e-Planning* tidak ada ya. Kalau pengalaman mungkin lebih mempermudah proses perencanaan dan target-target banyak tercapai”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo, Admin Bidang PSIK, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari wawancara bersama informan di atas, maka diketahui bahwa semua tim pengelola dan pengembangan *e-Planning* umumnya memiliki keahlian di bidang komputer. Berdasarkan analisa di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa SDM dalam sistem *e-Planning* sudah sangat bagus, namun ada beberapa kendala dari seringnya terjadi mutasi pada OPD. Mutasi ini mengakibatkan kasubbag baru tidak memahami cara kerja sistem *e-Planning* dalam waktu cepat. Dan ini berdampak pada kecenderungan terlambatnya pelaporan perencanaan dari setiap OPD.

### 5.2.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika para implementor mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para implementor bersikap negatif atau

menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Berikut adalah tanggapan dari informan penelitian :

“Sikap tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan itu sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebagai OPD. *E-Planning* setau saya ada dua admin ya. Itu saya rutin melakukan diskusi jika ada kendala misalnya, dan sejauh ini respon mereka cepat tanggap”. (Wawancara bersama Batam Saputra, Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan, diketahui bahwa ada dua admin yang siap membantu OPD dalam penggunaan sistem *e-Planning*. Semua OPD bisa menghubungi admin tersebut jika mengalami kendala dalam penggunaan sistem *e-Planning*. Berikut adalah tanggapan informan lainnya :

“Saya dalam sistemnya bertugas sebagai admin bidang ya. Kalau ada kendala di jaringan itu kita sebagai admin pengampu tidak bisa langsung ke hal-hal yang teknis. Kita melapor ke tim IT yang menangani aplikasi itu sendiri. kalau kendalanya itu tentu kita butuh waktu ya dalam penyelesaiannya. Jika tim IT mengatakan sudah ditangani maka baru kita laporkan kembali ya kepada OPD. Jadi cepat tanggap kok, responnya juga baik. Secara tidak langsung ini kan pelayanan publik ya”. (Wawancara bersama Erwin Suhandi, Admin Bidang PPM, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama Erwin Suhandi, selaku admin bidang PPM secara langsung, peneliti menemukan bahwa tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan respon cepat tanggap para admin dalam memberikan solusi

dalam setiap keluhan OPD. Hal yang sama turut disampaikan oleh informan berikut :

“Untuk sikap tim *e-Planning* itu sudah sangat baik ya. Kalau untuk reward setahu saya dari awal diimplementasikan hingga saat ini itu belum ada ya. Kualitas tim pelaksana sistem di dalam sistem sudah cukup. Kalau di luar sistem itu masih kurang karena mereka punya pekerjaan lainnya ya. Kalau harapan saya, kalau bisa ada penambahan SDM kedepannya untuk pengelola sistem ya”. (Wawancara bersama Akmal Fuadi, Analis Sistem Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa kualitas tim *e-Planning* sudah sangat bagus. Namun, informan menyayangkan sikap OPD yang belum bertanggungjawab terhadap tugas yang diemban.

Dalam sistem *e-Planning*, semua anggota subsistem atau pegawai pengampu melakukan tugas yang lebih banyak dari pegawai lainnya, dan yang sangat disayangkan juga mulai dari sistem *e-Planning* diterapkan hingga saat ini belum ada reward khusus yang diberikan kepada semua tim pengelola. Hal yang sama dibenarkan oleh informan berikut :

“Kalau untuk reward belum ada ya. Namun untuk fasilitas itu sudah lengkap dan memadai menurut saya”. (Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh informan berikut :

“Sejauh ini reward belum ada. Padahal tim sudah bertugas dan melakukan tugas dengan sangat baik ya. Mereka juga cepat tanggap dan itu adalah nilai plus tentunya. Untuk fasilitas itu sayangnya masih kurang pada komputerisasi yang canggih, jadi harapan saya itu adalah pembaruan spesifikasi komputer ya”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Staf Ahli Database Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Dari wawancara di atas, penutur menyampaikan bahwa untuk kinerja tim sistem *e-Planning* secara keseluruhan sudah sangat bagus. Namun beberapa informan penelitian menyayangkan tidak adanya sistem reward yang mendukung kinerja tim sistem *e-Planning*. Padahal secara kuantitas kerja, tim *e-Planning* memiliki beban kerja yang lebih banyak dari posisi kerja lainnya. Selain itu pada beberapa tim *e-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan fasilitas komputerisasi model lama. Tim *e-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti berharap adanya pembaruan komputerisasi dalam proses kerja mereka.

Hal ini dibenarkan oleh informan lainnya :

“Menurut saya kinerja tim itu sudah sangat bagus ya. Namun sayangnya komputer kita masih menggunakan versi lama. Untuk kendala mungkin pada jaringan internet ya. Jadi selalu internet bermasalah pada saat dibutuhkan gitu ya”. (Wawancara dengan Tabrani, Admin Pusat *e-Planning*)

Berdasarkan penuturan informan, kinerja tim *e-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sangat bagus, namun sangat perlu untuk didukung dengan komputer versi baru. Selain itu, kendala yang paling sering dialami adalah masalah jaringan internet. Hal ini turut dibenarkan oleh informan berikut :

“Dari awal implementasi masalah yang belum selesai hingga saat ini mungkin masalah jaringan. Karena hampir pada saat penting sistemnya malah terkendala oleh jaringan internet”. (Wawancara dengan Ahmad Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti)

Informan berikut juga menuturkan informasi yang sama dengan Ahmad

Baidowi :

“Harapan kita kedepannya aplikasi lebih mudah digunakan. Dan untuk SDM harus ada reward. Itu harapan kita. Karena sejauh ini OPD baru kesulitan memahami item dan fitur aplikasinya. Dan juga pekerjaan tim *e-Planning* itu kan lebih banyak ya, dari awal tahun sampai akhir tahun tidak ada jeda. Jadi kalau bisa ada reward. Dan juga untuk masalah internet seharusnya ada solusi dari Kominfo”. (Wawancara dengan Rian Hidayat, Operator Sistem *e-Planning*)

Berdasarkan penuturan di atas ditemukan bahwa selalu terjadi mutasi pejabat di dalam OPD. Ini mengakibatkan *user* OPD yang baru mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan aplikasi *e-Planning*. Oleh karena itu informan menyarankan agar aplikasi dibuat sederhana tanpa mengurangi fungsinya. Sehingga OPD baru yang melakukan mutasi lebih cepat memahami dan menggunakan aplikasi sistem *e-Planning*. Berikut adalah pendapat informan lainnya, yaitu Ulil Amri :

“Tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sudah cukup bagus ya. Saran saya untuk tim lebih ke penyederhanaan aplikasi saja ya. Karena kan OPD sering ada mutasi ya. Jadi kadang anggota baru susah memahami aplikasinya”. (Wawancara dengan Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa kinerja tim *e-Planning* sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Namun beberapa informan penelitian menyampaikan saran bahwa penting untuk dilakukannya penyederhanaan aplikasi karena kondisi OPD yang sering

melakukan mutasi kasubbag program sebagai *user e-Planning*. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Untuk penguasaan kerja oleh tim sudah cukup baik ya. Mampu memenuhi harapan kita terhadap penggunaan *e-Planning* ini. Harapan saya mungkin kalau bisa perangkat lunak selalu di *upgrade* ya”. (Wawancara dengan Khairi, Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang PPE, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Hal yang sama disampaikan oleh informan berikut :

“Kinerja tim sudah sangat bagus ya. Tim juga menyampaikan secara detail mengenai pengimplementasian sistem ini. Jika missal OPD tidak paham melalui WA atau *Zoom meeting* kita langsung mengunjungi OPD untuk memperjelas kerjanya”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo, Admin Bidang PSIK, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa hingga saat ini masalah jaringan adalah kendala tim *e-Planning* dalam mengelola aplikasi. Peneliti menilai bahwa tim *e-Planning* sudah sangat bagus dalam melakukan tugasnya. Namun sangat disayangkan belum ada sistem reward yang diperuntukkan bagi tim *e-Planning*, padahal tim *e-Planning* memiliki beban kerja yang lebih padat dari posisi kerja lainnya.

Adanya komunitas seperti group WhatsApp bagi semua pengguna *e-Planning* membuktikan bahwa sistem sudah sangat akuntabel dan transparan. Dari penelitian yang dilakukan peneliti menilai bahwa sistem *e-Planning* BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini harus didukung oleh fasilitas yang memadai seperti jaringan internet yang bagus dan komputerisasi yang modern serta SDM yang mumpuni.

#### 5.2.4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Dalam pengimplementasiannya, tim yang bekerja mengelola sistem *e-Planning* harus berada pada iklim organisasi yang mendukung. Berikut tanggapan informan :

“Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan implementasi Sistem *e-Planning* kalau yang pegangan OPD belum ada ya. Namun kita ada ebook yang dishare oleh adminnya, tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan sangat cepat tanggap ya”. (Wawancara bersama Batam Saputra, Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan penuturan dari informan di atas, dalam organisasi kerja tim *e-Planning* sangat cepat tanggap dalam merespon setiap kendala OPD. Meskipun belum ada SOP khusus untuk OPD, OPD dibantu oleh *e-Book* yang berisi panduan dalam menjalankan aplikasi *e-Planning* dan *e-Book* tersebut disebarakan oleh admin melalui group WhatsApp. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Menurut saya Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna cukup baik dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem *e-Planning*, memang ada beberapa OPD yang belum bisa dikatakan bertanggungjawab dalam tugasnya karena sering terlambat dalam melaporkan perencanaan. Tapi tentu ada kendala pada mereka ya. Apalagi seiring dengan seringnya terjadi mutasi”. (Wawancara bersama Erwin Suhandi, Admin Bidang PPM, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sistem *e-Planning* sudah sangat mendukung namun yang sangat disayangkan adalah dari sisi OPD nya. Dimana OPD selalu mengalami mutasi dan ini menyebabkan pemahaman tim baru yang menggantikan operasional *e-Planning* pada OPD agak lamban dan mengakibatkan laporan perencanaan selalu terlambat.

Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau manual Book ada ya. Harapan kita semoga ada penambahan SDM yang memang memahami bidang ini gitu ya”. (Wawancara bersama Akmal Fuadi Analis Sistem Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Hal yang sama juga dituturkan oleh informan berikut:

“Kemampuan SDM kita sudah sangat bagus ya. Mungkin kedepannya harus ada pengembangan-pengembangan baru saja”. (Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Menurut informan, secara keseluruhan sistem *e-Planning* memang sudah sangat bagus. Ini dibuktikan dengan terkontrolnya substansi perencanaan secara lebih mudah. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Jika secara keseluruhan sudah bagus ya. Namun diharapkan ke depannya bagi OPD yang menggunakan sistem *e-Planning* ini memiliki kompetensi di bidang komputer”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Staf Ahli Database Tim Pengembang Sistem *e-Planning*)

Pada wawancara bersama Iman Firdaus, ditemukan bahwa kebanyakan OPD tidak memiliki ahli komputerisasi yang menangani sistem *e-Planning*, akibatnya ketika ada kendala seperti *missing* sistem, pihak OPD hanya berkiblat kepada admin BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal yang sama turut disampaikan oleh Tabrani sebagai berikut :

“Kalau dari sisi organisasi sungguh sudah bagus ya. Namun saran dari saya itu kalau bisa komputer yang digunakan adalah versi terbaru”. (Wawancara dengan Tabrani, Admin Pusat Sistem *e-Planning*)

Pendapat Tabrani didukung oleh informan berikut :

“Organisasi dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah bagus ya dalam mendampingi OPD. Namun kita berharap OPD lebih giat dan gigih dalam penerapan sistem *e-Planning* ini”. (Wawancara dengan Ahmad Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukapil Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas, diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya sudah sangat bagus dalam mendampingi OPD menerapkan *e-Planning*. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwasanya adanya mutasi adalah hambatan terbesar bagi OPD dalam menerapkan sistem *e-Planning*. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Menurut saya OPD sedikit sulit memahami penyampaian dari admin pengelola saat ada *missing* sistem di aplikasinya. Karena itu butuh aplikasi yang sederhana agar mudah digunakan dan dipahami oleh OPD yang notabene bukan ahli komputer. Selain itu semoga saja ada sistem reward bagi tim pengembang dan pengguna *e-Planning* ini”. (Wawancara dengan Rian Hidayat, Operator Sistem *e-Planning*)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas didapatkan informasi bahwa OPD kekurangan ahli komputer yang dapat dengan mudah memahami maksud dari penyampaian admin saat terjadi *missing* sistem pada aplikasi. Dari hemat peneliti, organisasi dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan tugas mereka dengan baik, namun kendala implementasi lebih berada pada OPD.

Berikut adalah tanggapan informan lainnya :

“Setau saya tidak ada SOP dalam pelaksanaan implementasi sistem e-Planning ini. Komitmen tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sudah sangat bagus ya”. (Wawancara dengan Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas diketahui bahwa untuk tim pengelola bagian program belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi Sistem *e-Planning*. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau pada tim kami ada SOP, dan ada manual book juga. Harapan saya semoga kedepannya ada integritas yang kita bangun dalam menggunakan *e-Planning* ini”. (Wawancara dengan Khairi, Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang PPE BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Hal ini dibenarkan oleh pendapat informan berikut:

“Kalau SOP untuk tim pengembang mungkin ada ya. Tapi untuk OPD lebih ke manual Book. Saat ini kan kendala kita ada di jaringan ya. Kadang ada juga OPD nanya ke kita tapi belum bisa kita jawab dan kita oper pertanyaan tersebut ke kominfo, sayangnya ya itu belum bisa kita

atasi pertanyaannya”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo, Admin Bidang PSIK BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara bersama informan, peneliti menyimpulkan bahwa bagi tim pengelola dan pengembangan sudah ada SOP dalam pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning*, namun bagi OPD hanya disediakan *manual book* sebagai panduan penggunaan.

Peneliti juga menangkap informasi temuan penelitian bahwa komitmen tim *e-Planning* dalam menjalankan tugas yang diberikan. Selain itu OPD sebagai pengguna sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem *e-Planning*.

### **5.3. Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Sistem *E-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi sistem *e-Planning* pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat sebagai berikut, antara lain :

#### **1. Proses Mutasi Kasubbag dari setiap OPD**

Adanya sistem *e-Planning* yang sekarang sedang dikembangkan di daerahdaerah demi mencapai tujuan untuk mengarahkan pembangunan di semua tingkat pemerintah dari terendah hingga tertinggi arah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga nantinya rencana-rencana pembangunan yang dibuat tidak lagi salah sasaran dan menguntungkan pihak-pihak

tertentu saja. Hal ini penting diwujudkan karena cerminan dari pembangunan daerah yang benar adalah proyeksi dari apa yang benar-benar masyarakat daerah butuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Organisasi publik yang notabene adalah ranah pemerintahan, tidak bisa terlepas dari aktivitas mutasi pegawai. Jika dalam layanan publik yang tidak terikat dengan *e-Government* maka seharusnya mutasi tidak menjadi masalah krusial.

Namun berbeda dengan layanan *e-Government*, di mana dalam implementasinya memiliki tahapan dan pengembangan. Dalam proses *e-Government* keahlian pegawai menjadi salah satu aspek penting yang harus dilatih sedetail mungkin. Di mana keahlian tersebut akan digunakan dalam pengoperasian sistem yang digunakan.

Hal yang sama juga berlaku pada pengguna sistem *e-Planning*. Dalam penerapannya membutuhkan sosialisasi yang tidak bisa hanya sekali. Butuh pemahaman dasar yang kuat dan detail supaya *user* memahami dalam pengoperasian *e-Planning*.

Namun permasalahan mutasi tidak dapat dielakkan. Sangat sering mutasi terjadi pada OPD yang menggunakan sistem *e-Planning* di Kepulauan Meranti. Akibatnya setelah pergantian operator atau admin dari setiap OPD terjadi penyesuaian yang sangat lama. Seperti kembali belajar dari awal. Akibatnya sangat banyak OPD yang sering

terlambat dalam melaporkan tugas dan kewajiban mereka sebagai aktor perencanaan.

Mutasi kassubag program atau perencanaan setiap OPD adalah gambaran dari sistem regulasi yang selalu berubah-ubah. Regulasi baru akan menimbulkan efek dan dampak baru dalam implementasi *e-Planning*. Dengan demikian, hambatan baru juga akan muncul dan membutuhkan evaluasi program untuk penyelesaiannya.

Banyaknya hambatan dan kendala yang menjadikan sebuah program tidak berjalan dengan semestinya. Biasanya dasar permasalahan yang terjadi dalam merencanakan sebuah pembangunan adalah cara berfikir yang masih linier atau ke satu arah saja (top down model) yang memicu tidak terlihatnya isu-isu dan masalah di level masyarakat di daerah tersebut sehingga kepentingan mereka tidak terakomodir oleh pembangunan yang dilakukan.

Ketika sebuah organisasi menerapkan sebuah sistem dan program yang baru maka tidak serta merta menjadikan organisasi tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Selama masa perencanaan program tersebut sampai pada tahapan implementasi dan evaluasi lah terjadi proses adaptasi. Proses adaptasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah *man power* yaitu Pegawai Pemerintahan Kepulauan Meranti.

Hubungan antara penyesuaian diri terhadap perubahan berbanding lurus dengan keberhasilan organisasi. Jika proses adaptasi cepat dan berhasil dilakukan maka organisasi tersebut berhasil mengatasi perubahan, namun sebaliknya jika proses adaptasi lambat dan gagal maka organisasi tersebut menjadi korban dari perubahan.

Dalam mengukur keberhasilan adaptasi ini bisa dilihat dari pengembangan kemampuan pegawai di BAPPEDA Kepulauan Meranti dan juga dari penyesuaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menerapkan *e-Planning* ini.

Peneliti melihat meskipun ada peningkatan pengetahuan, tanpa adanya bimbingan teknis atau pelatihan, tetap tidak maksimal. Ini dilihat dari wawancara yang menunjukkan anggota OPD merasa kebingungan di awal dan juga tidak cukup hanya belajar dengan buku panduan dan sharing saja. Menurut mereka, hasil kerja mereka akan maksimal jika ada bimtek yang membantu mereka paham secara lebih mendalam, selain itu bimtek juga bisa meminimalisir kesalahan kerja yang dilakukan.

## 2. Jaringan Internet

Masalah internet bukanlah masalah baru dalam sistem *e-Planning*. Internet yang digunakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola sistem *e-Planning* sering bermasalah pada saat krusial dan pada saat paling diperlukan. Masalah

internet yang down juga dialami oleh OPD. Sering kali *user* di OPD panik karena gangguan internet saat mengoperasikan aplikasi sistem *e-Planning*. Hingga saat ini belum ada solusi untuk masalah jaringan internet pada sistem *e-Planning* di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yaitu sebagai berikut Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup bagus dan sudah terimplementasi dengan baik di mana dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala umum seperti SDM yang kurang kompeten di bidang komputerisasi karena tidak adanya pelatihan khusus dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi hingga Kementerian. Padahal pelatihan akan sangat membantu terciptanya SDM handal dalam pengelolaan sistem *e-Planning* pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

Faktor penghambat pada Implementasi Sistem *e-Planning* pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti yang paling dominan adalah proses mutasi jabatan yang cukup sering terjadi sehingga butuh proses adaptasi yang lama bagi tim baru untuk mengelola sistem *e-Planning* di OPD.

Dan juga faktor jaringan internet masih menjadi penghambat terlaksananya Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dikarenakan sering terjadinya gangguan stabilisasi

sehingga menyebabkan *login* gagal atau *server error*.

## 6.2. Saran

Dalam uraian kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran yang dapat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan Implementasi Sistem *e-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan bisa membentuk kaderisasi dalam subsistem *user* pengelola *e-Planning* di setiap OPD. Sehingga jika terjadi mutasi maka ada kader-kader yang sudah terlatih untuk cepat menggantikan posisi tersebut.
2. Bagi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan dapat mengadakan pelatihan dan pendidikan khusus yang tersertifikasi bagi pengembang dan *user e-Planning* dan juga menciptakan sistem reward yang dapat menumbuhkan motivasi kerja dan meningkatkan kerja semua pihak yang ikut andil dalam pengelolaan *e-Planning* di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
2. Abdurrahman, Arif. 2005. *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
3. Al Fatta, Hanif. 2009. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
4. Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
5. Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
6. Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
7. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
8. Andry. 2015. *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. AE*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol. 3 No. 2 September 2015.
9. Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group

10. Egis Tektona Gandis. 2020. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.*
11. George R. Terry, 2005. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT. Erlangga.
12. Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2011. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
13. Indrajit, dkk. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan. Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital.* Yogyakarta: Andi.
14. Kusmiadi, Rahmat. 2005. *Teori dan Teknik Perencanaan.* Bandung: Ilham Jaya.
15. Keban, Yeremias, T, 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga).* Yogyakarta: Gava Media.
16. Lantip Diat, Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan.* Yogyakarta: Gava Media
17. Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan.* Bandung: Alfabeta.
18. Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan. Komunikasi.* Bandung: Alfabeta.
19. Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.
20. Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

21. Prasajo, Lantip Diat dan Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media
22. Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
23. Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
24. Soekartawi. 2004. *Pengantar Agroindustri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
25. Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
26. Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung.
27. Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.
28. Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
29. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
30. Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
31. Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
32. Sun'an, Muammil dan Senuk, Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
33. Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

34. Toha. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
35. Warsita, Bambang. 2008. *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
36. Wayan Dedi Juniawan. *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan e-Planning (Studi Kasus pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Gianyar)*. *JIAP Vol. 5 No. 3 (2019)* 285-293. 285. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. URL: <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>.
37. Yin, Robert. K. 2009. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
38. Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
39. Zulkifli, dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Tujuh Publishing.

#### **Jurnal dan Dokumen**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 201 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Telaah Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:050/BAPPEDA-set/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017;
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
14. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 29/HK/KPTS/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD;
15. User Manual *e-Planning*
16. Dokumen Laporan Pelaksanaan Sistem Aplikasi *e-Planning*

